

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LUMBUNG MATARAMAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALURAHAN BALONG, KECAMATAN GIRISUBO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Laras Sita Pangesti¹, Dr. Febriana Muryanto M. Sc²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gunung Kidul, ²Universitas Gunung Kidul

Corresponding Autor: larassitap@gmail.com

Article History

Received: May

Revised: June

Published: June

Key Words:

Policy

Implementation,

Community Welfare,

Lumbung Mataraman.

Abstract: The policy implementation of the "Lumbung Mataraman" (Mataraman Granary) aims to enhance the welfare of the Balong Village community in Girisubo District, Gunungkidul Regency. This study, employing a qualitative descriptive approach, examines how the program affects local welfare. Gunungkidul's poverty remains a critical issue despite recent reductions, with the poverty rate dropping from 15.86% in 2022 to 15.60% in 2023. The Lumbung Mataraman initiative, funded by the Special Autonomy Fund, seeks to revive traditional agricultural practices, promote food independence, and support local economic development. Implemented through 12 farmer groups, the program faces challenges such as water resource limitations, which the village government plans to address by integrating it with local reservoirs. Effective communication, adequate resources, committed local government, clear bureaucratic structure, and sustainable integration are crucial for the program's success. Initial results indicate positive impacts on local welfare, with further developments expected as the program matures.

Kata Kunci:

Implementasi

Kebijakan,

Kesejahteraan

Masyarakat, Lumbung

Mataraman.

Abstrack: Implementasi kebijakan "Lumbung Mataraman" bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk meneliti dampak program terhadap kesejahteraan lokal. Kemiskinan di Gunungkidul tetap menjadi masalah penting meskipun ada penurunan, dengan angka kemiskinan turun dari 15,86% pada tahun 2022 menjadi 15,60% pada tahun 2023. Inisiatif Lumbung Mataraman, didanai oleh Dana Keistimewaan, bertujuan menghidupkan kembali praktik pertanian tradisional, mempromosikan kemandirian pangan, dan mendukung pengembangan ekonomi lokal. Diimplementasikan melalui 12 kelompok tani, program ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya air, yang akan diatasi dengan mengintegrasikan program dengan embung lokal. Komunikasi efektif, sumber daya memadai, komitmen pemerintah lokal, struktur birokrasi yang jelas, dan integrasi berkelanjutan sangat penting untuk keberhasilan program. Hasil awal menunjukkan dampak positif terhadap kesejahteraan lokal, dengan perkembangan lebih lanjut diharapkan seiring dengan kematangan program.

Pendahuluan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 11 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul No. 2 Tahun 2010 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025, didalamnya menyebutkan bahwa masalah kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul masih akan menjadi ancaman yang perlu ditangani secara cermat dan serius. Meskipun masalah kemiskinan sudah dapat ditekan, namun masalah kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan tahun 2025 mendatang. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul, indikator kemiskinan pada tahun 2021-2023, presentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2022 mencapai 15,86% sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 15,60% (BPS Kab. Gunungkidul). Walaupun mengalami penurunan, namun pemerintah harus tetap memperhatikannya, karena seperti yang sudah



disebutkan didalam RPJPD Tahun 2005-2025, bahwasannya kemiskinan masih menjadi perhatian penting dalam pembangunan mendatang.

Didalam RPJPD Tahun 2005-2025 juga menyatakan bahwa jumlah penyandang masalah kesejahteraan di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi, namun prediksi kondisi kesejahteraan sosial pada tahun 2025 mendatang diharapkan taraf hidup dan kesejahteraan sosial masyarakat semakin meningkat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul menyatakan, pembangunan sosial dan ekonomi yang dilakukan secara bebarengan di tingkat regional maupun nasional, memiliki tujuan utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan senantiasa berkembang dan mengalami perluasan sesuai dengan adanya dimensi dan kompleksitas persoalan yang melingkupinya. Beberapa hasil atau dampak yang signifikan dari proses pembangunan yang telah selesai, terutama dalam hal kesejahteraan masyarakat, dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut menjadi petunjuk sistematis adanya kecenderungan yang merupakan hasil dari sebuah penelitian yang telah dilakukan di suatu wilayah tertentu. Dalam konteks ini, indikator berfungsi sebagai alat evaluasi yang dapat bersifat positif maupun negatif. Indikator juga berfungsi sebagai sarana yang sangat efektif untuk menginformasikan berbagai hal yang berkaitan dengan proyek-proyek pembangunan yang sedang berjalan dan akan dilakukan di suatu wilayah (Gunungkidul, 2023). Dalam buku informasi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul, dijelaskan bahwa arah pembangunan Kabupaten Gunungkidul dilandasi oleh filosofi dari leluhur, serta pandangan ke depan. Tahun 2021-2026 adalah tahun yang menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni “Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul Yang Bermartabat Tahun 2026” (Informasi Pembangunan Daerah, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan kebijakan yang baik bagi masyarakat.

Adanya pembangunan Lumbung Mataraman ini, merupakan kebijakan dari Gubernur Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX. Program ini dijalankan dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Di Kabupaten Gunungkidul, program ini sudah dijalankan di 3 Kalurahan. Pada tahun 2022 sudah dijalankan di Kalurahan Bendung Kapanewon Semin, tahun 2023 di Kalurahan Kedungpoh Kapanewon Nglipar dan Kalurahan Balong Kapanewon Girisubo. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Adanya program Lumbung Mataraman ini, nantinya akan sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, diharapkan kualitas hidup masyarakat di kalurahan Balong dapat meningkat secara signifikan.

Lumbung Mataraman yang dilaksanakan melalui anggaran Dana Keistimewaan ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali tradisi pertanian di Yogyakarta yaitu memanfaatkan lahan pekarangan rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan pangan dengan prinsip: kemandirian pangan, diversifikasi pangan berbasis sumber pangan lokal, pelestarian sumber daya genetik pangan, dan kebun bibit (R, Wattimena, Septiyanti, & Mutiarin, 2021). Kalurahan Balong mayoritas pekerjaannya petani, sehingga sangat relevan jika kebijakan ini dijalankan di sana. Kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal apabila kebijakan dijalankan dengan baik. Lumbung Mataraman ini dikelola oleh kelompok tani di Kalurahan Balong.

Melihat keadaan Lumbung Mataraman yang masih baru, maka dampaknya bagi masyarakat belum maksimal, perlu dilihat juga apakah kebijakan program pembangunan ini akan mendorong kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh masyarakat lokal, lahan Lumbung Mataraman bisa dikatakan belum luas, sehingga hasil

panen yang didapatkan belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat lokal. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pembangunan Lumbung Mataraman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kalurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul.” Penelitian ini nantinya akan membantu menjawab permasalahan yang ada.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian ini akan mendalami bagaimana implementasi kebijakan pembangunan Lumbung Mataraman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini tentunya akan bersifat deskriptif. Pendekatan kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk memahami berbagai perspektif, nilai maupun konteks yang melatarbelakangi fenomena yang terjadi. Menurut Sri Sultan, Lumbung Mataraman yang dilakukan oleh kalurahan disesuaikan dengan potensi masing-masing kalurahan. Kepala desa dan perangkat desa menjadi pihak yang paling tahu potensi masyarakat yang dapat dikembangkan dengan program Lumbung Mataraman. Program ini ditujukan untuk mendukung kemandirian masyarakat dan hanya dapat dilaksanakan bagi kalurahan yang sudah siap (Pemerintah Daerah DIY, 2023). Kalurahan Balong merupakan kalurahan yang mayoritas pekerjaannya petani. Lahan yang ada di Kalurahan Balong yaitu lahan tegalan, dimana lahan ini akan bergantung pada air hujan sebagai sumber air. Sehingga sangat memungkinkan bahwa Kalurahan Balong dapat menjalankan program tersebut, Kalurahan Balong tentunya juga sudah siap menjalankan program Lumbung Mataraman. Dengan demikian, lokasi yang akan dijadikan tempat untuk meneliti adalah Lumbung Mataraman yang terletak di Kalurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Maret-18 April tahun 2024.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Sugiyono (2013) dalam (Nurjanah, 2021) yang menyatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak pelaku dalam pengimplementasian program Lumbung Mataraman Kalurahan Balong. Sementara sumber data sekunder menurut Sugiyono (2013) dalam (Nurjanah, 2021) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumentasi. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini yaitu, dari studi literatur, dokumen- dokumen dan dokumen resmi pemerintah yang memberikan pengetahuan mengenai penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara detail mengenai program Lumbung Mataraman, sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan dari grand theory Edward III, yang diperbaharui oleh (Muryanto, 2024) disampaikan dalam penelitiannya, bahwa indikator/variabel ada 6, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, integritas berkelanjutan, dan hubungan lintas budaya.

Hasil dan Pembahasan

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Kalurahan Balong adalah sebagai petani, dengan jumlah 3.734. Yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil 12 jiwa, TNI/Polri 1 jiwa, wiraswasta/pedagang 39 jiwa, dan buruh tani ada 2.070 jiwa., program ini tentunya sesuai untuk diimplementasikan di Kalurahan Balong. Pelaksanaan program kebijakan ini melibatkan 3 aktor utama, yakni pemerintahan kalurahan, kelompok tani dan masyarakat. Pemerintah Kalurahan menjadi inisiator utama dalam pembangunan Lumbung Mataraman dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kalurahan secara aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak seperti Kelompok Tani, mereka memastikan

bahwa seluruh tahapan program direncanakan dengan baik dan disesuaikan dengan kondisi lokal. Saat ini hasil panen yang diperoleh dari program Lumbung Mataraman ini akan diberikan kepada masyarakat, baik nantinya akan dibagi secara merata atau akan dijual untuk dijadikan kas, hal tersebut tergantung dari kesepakatan kelompok tani masing-masing. Menurut Pemerintah Kalurahan, program ini harus ada demi kepentingan masyarakat. Adanya hasil dari penelitian yang saya lakukan, maka pembahasan dan temuan yang dapat dijabarkan dengan menggunakan teori yang saya gunakan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam konteks Implementasi Kebijakan Lumbung Mataraman di kalurahan Balong, komunikasi merupakan salah satu kunci utama dalam memastikan pemahaman dan keberhasilan dalam pelaksanaan program. Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2011), komunikasi yang efektif menjadi faktor penentu dalam menjaga kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan pada para implementator sehingga nantinya dapat mengurangi distorsi implementasi. Pemerintah Kalurahan Balong menerapkan strategi resmi melalui beberapa media untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap pentingnya program Lumbung Mataraman ini. Menurut Bapak Purwanto, Carik kalurahan Balong. Dalam wawancaranya terungkap bahwa sebelum memanfaatkan media sosial, pemerintah kalurahan lebih menekankan pada rapat warga dan rapat kelompok tani untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan langsung. Pendekatan ini dimaksudkan dengan tujuan untuk membangun organisasi internal yang kuat, sehingga memastikan bahwa para implementator memiliki pemahaman yang sama dan komitmen yang tinggi terhadap program yang dilaksanakan.

Disisi lain, ketua gapoktan, Bapak Samid juga menyampaikan pentingnya komunikasi, melalui rapat kring sebagai salah satu strategi untuk menyebarkan informasi mengenai program kepada anggota kelompok tani. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana komunikasi yang langsung dan terfokus pada kelompok sasaran akan memperkuat partisipasi dan dukungan dari level terdepan dalam pengimplementasian kebijakan. Masyarakat juga turut aktif dalam menyampaikan gagasan, masukan dan umpan balik untuk kemajuan program. Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa responden seperti Ibu Sutarmiyati, Bapak Wardo Sulito, Ibu Sunarti, Bapak Sagiman dan istrinya, terungkap bahwa mereka menggunakan berbagai forum seperti rapat kring, arisan kelompok dan musyawarah sebagai sarana untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan program Lumbung Mataraman. Masyarakat berperan sebagai agen perubahan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dalam hal ini, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi merupakan instrumen yang sangat penting dalam membangun pemahaman bersama, memperkuat keterlibatan aktif dan mengurangi kesenjangan antara perencanaan kebijakan dan implementasi di lapangan. Komunikasi yang efektif dapat memastikan bahwa tujuan dan sasaran kebijakan akan mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, strategi komunikasi menjadi salah satu kunci dalam memastikan keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat.

2. Sumber Daya

Dalam pengimplementasian program ini, walaupun komunikasi kebijakan telah dilakukan secara jelas dan konsisten, namun kekurangan sumber daya dapat menjadi hambatan dalam pengimplementasian. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya finansial. Dalam wawancara dengan Bapak Purwanto, Carik Kalurahan Balong, terungkap bahwa pihak yang terlibat dalam pengimplementasian program Lumbung Mataraman ini, melibatkan pemerintah

kalurahan, kelompok tani (yang didalamnya melibatkan masyarakat), Komunitas Wanita Tani (KWT), dan petani milenial. Dalam hal ini, kelompok tani ini menjadi salah satu aktor utama yang ikut serta dalam mengelola program ini. Menurut Bapak Samid, ketua Gapoktan Kalurahan Balong, terdapat 12 kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaan program, tersebar masing-masing padukuhan dan lembaga di kalurahan, dengan menekankan pada aspek partisipatif yang melibatkan masyarakat.

Dalam memastikan keberlanjutan program, pemerintah kalurahan mengalokasikan anggaran sekitar 20% setiap tahunnya guna menyuplai dan mengembangkan potensi dalam pengimplementasian program Lumbung Mataraman. Hal ini menunjukkan upaya serius untuk memastikan bahwa program tersebut tidak hanya berjalan lancar ditahap awal saja, namun memiliki pondasi kuat untuk berkelanjutan dimasa depan. Namun dalam hal ini, ada satu tantangan terbesar yang dihadapi, yaitu keterbatasan sumber daya air. Dengan demikian pemerintah kalurahan berencana akan mengintegrasikan program Lumbung Mataraman ini dengan embung yang ada di kalurahan Balong. Rencana ini tentunya merupakan langkah strategis dalam mengatasi keterbatasan sumber daya air dan mendukung keberlanjutan program. Embung tersebut diharapkan mampu menampung air selama musim penghujan dan menyimpannya untuk digunakan saat musim kemarau. Sehingga dengan adanya embung, ketergantungan pada musim penghujan dapat dikurangi, dan pertanian dapat beroperasi lebih efektif sepanjang tahun.

3. Disposisi

Pemerintah kalurahan menegaskan komitmen dan konsistensi tinggi dalam pelaksanaan program Lumbung Mataraman. Bapak Purwanto, Carik Kalurahan Balong, menyatakan keyakinan bahwa tingginya komitmen dari pemerintah setempat akan memastikan keberhasilan program ini. Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementator dalam hal ini memiliki disposisi yang diharapkan oleh Edward III untuk memastikan implementasi yang efektif. Komitmen dan konsistensi dari implementator menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan program. Kedua karakteristik tersebut mencerminkan kesungguhan dalam memberikan dukungan dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk keberhasilan program. Pentingnya disposisi yang positif dari implementator dapat menghindarkan perbedaan pandangan atau sikap yang dapat menghambat proses implementasi. Ketika pemerintah kalurahan menunjukkan keseriusan dan komitmen, hal ini tentunya akan membentuk keselarasan antara implementator dengan tujuan pembuat kebijakan.

4. Birokrasi

Dalam konteks pengelolaan lumbung mataraman di Kalurahan Balong, struktur organisasi yang tergambar melibatkan berbagai pihak dalam pengimplementasian program tersebut, terdapat dua belas kelompok tani yang terlibat dalam pengelolaan program, namun menurut Bapak Samid selaku ketua Gapoktan Kalurahan Balong, terdapat satu kelompok tani, yaitu kelompok Karang Taruna yang belum memiliki nomor induk di tingkat Dinas pertanian termasuk Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) Girisubo. Kehadiran SOP dalam penanganan masalah implementasi juga dilihat dari pernyataan Bapak Samid, menurutnya apabila terjadi masalah didalam pengimplementasian maka kelompok tani wajib melapor kepada Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), kemudian PPL melaporkannya ke BPP, dan nantinya penanganan akan sampai ke tingkat Provinsi. Hal ini mencerminkan adanya prosedur yang jelas dan terstruktur dalam menangani kendala yang mungkin timbul selama pelaksanaan program.

Meskipun struktur organisasi yang terlihat melibatkan berbagai pihak dan memiliki jalur komunikasi yang teridentifikasi dengan baik perlu diwaspadai juga potensi fragmentasi dalam struktur ini. Fragmentasi, atau pecahan-pecahan struktur organisasi yang mungkin terjadi karena kompleksitas atau koordinasi yang kurang efektif antar unit atau level dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Pentingnya koordinasi dan keselarasan antar unit dalam struktur organisasi menjadi faktor kunci untuk memastikan kelancaran implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif antar berbagai pihak yang terlibat termasuk kelompok tani, penyuluh pertanian dan instansi terkait lainnya, akan mampu mendukung sinergi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan efektif. Dengan demikian, pemahaman dan pengelolaan terhadap struktur organisasi yang terlibat dalam pengimplementasian, menjadi aspek yang penting dalam memastikan keberhasilan program Lumbung Mataraman. Sinergi dan koordinasi yang baik, serta adanya prosedur penanganan yang terstruktur akan membantu optimalnya pengimplementasian kebijakan dan mencapai tujuan program secara menyeluruh.

Dalam hal pendistribusian hasil panen dari Lumbung Mataraman, pihak pemerintah kalurahan tidak memiliki SOP atau aturan khusus dalam hal pendistribusian kepada masyarakat. proses ini sepenuhnya diserahkan kepada kelompok tani, artinya bagaimana pendistribusian hasil itu sesuai dengan musyawarah masing-masing kelompok tani yang tentunya didalam kelompok tani terdapat unsur masyarakat. Menurut Carik Kalurahan Balong, pada tahun pertama, hasil panen dikelola oleh masing-masing kelompok tani yang harapannya dapat menjadi tabungan kelompok yang nantinya dapat digunakan untuk penanaman di tahun berikutnya. Kelompok tani memiliki kebebasan untuk membagi hasil panen secara merata kepada masyarakat atau menjualnya. Namun menurut masyarakat hasil belum bisa dirakasan karena tanaman yang ditanam belum panen, karena program ini baru dijalankan.

5. Integritas Berkelanjutan dan Hubungan Lintas Budaya

Dalam konteks implementasi program Lumbung Mataraman di Kalurahan Balong, upaya dalam memastikan keberlangsungan dan pengembangan program ini telah menjadi fokus utama pihak kalurahan. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan bapak Purwanto, Carik Kalurahan Balong, bahwa pemerintah kalurahan memiliki harapan besar terhadap keberlanjutan program. Bukan hanya sebagai program pertanian semata, namun juga sebagai pintu masuk untuk pengembangan sektor pariwisata di wilayah kalurahan Balong. Kolaborasi lintas pemerintahan, dari tingkat kapanewon hingga provinsi, menjadi kunci dalam menggalang dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk melanjutkan dan mengembangkan program ini. Pemerintah kalurahan secara jelas menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang baik dengan pemerintah kapanewon hingga provinsi untuk mengembangkan Lumbung Mataraman menjadi sebuah program yang lebih besar dan berkelanjutan.

Sementara itu, ketua Gapoktan Kalurahan Balong, Bapak Samid, melihat potensi integrasi antara Lumbung Mataraman dengan sektor pariwisata sebagai langkah strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat lokal secara holistik. Beliau juga menyatakan dengan adanya tapak tilas bersejarah yang ada di Lumbung Mataraman dapat menjadi objek wisata yang menarik. Program ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pertanian dan ekonomi lokal, namun dapat memicu perkembangan sektor pariwisata yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Menggunakan potensi wisata sejarah dan alam yang dimiliki wilayah Kalurahan Balong sebagai nilai tambah,

program ini mengarah untuk memberikan dampak positif yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Dalam pengimplementasian program Lumbung Mataraman ini, pentingnya membangun kolaborasi lintas sektor dan lintas budaya menjadi landasan strategis. Hubungan erat antara pemerintah kalurahan, kelompok tani dan instansi pemerintah lainnya ditingkat yang lebih tinggi menjadi sebuah modal dalam menggalang dukungan, sumber daya dan peluang untuk mengembangkan program. Dengan mengintegrasikan pertanian, pariwisata dan pengembangan ekonomi lokal, program ini diharapkan menjadi contoh sukses dalam menghadirkan perubahan positif bagi masyarakat lokal dan lingkungan sekitarnya.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program Lumbung Mataraman di Kalurahan Balong, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Kalurahan Balong memiliki potensi besar disektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Penelitian ini, menggunakan teori Edward III yang diperbaharui oleh Muryanto (2024), dengan menyoroti aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, birokrasi, serta integritas berkelanjutan dan hubungan lintas budaya. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Pemerintah Kalurahan Balong berhasil melakukan komunikasi yang efektif melalui berbagai metode seperti rapat warga, pertemuan kelompok tani dan penggunaan media sosial. Komunikasi yang baik tentunya berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya program Lumbung Mataraman dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi aktif dalam program ini, walaupun ada beberapa masyarakat yang belum terlalu paham dengan program ini.

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia dan finansial yang ada sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program Lumbung Mataraman. Implementasi program ini melibatkan pemerintah kalurahan dan 12 kelompok tani yang mengelola. Terdapat tantangan dalam keterbatasan sumber daya air, yang tentunya dapat menghambat kegiatan pertanian di Lumbung Mataraman. Namun dalam mengatasi hal ini, pemerintah kalurahan merencanakan integrasi program dengan embung yang ada di Kalurahan Balong untuk memastikan ketersediaan air yang cukup.

3. Disposisi

Komitmen dan konsistensi pemerintah kalurahan dalam menjalankan program sangat tinggi. Disposisi yang baik ini merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan program, karena menunjukkan dedikasi pemerintah dalam mencapai tujuan program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Birokrasi

Struktur organisasi dalam pengelolaan Lumbung Mataraman melibatkan berbagai pihak dengan jalur komunikasi yang jelas. Dalam menangani masalah yang mungkin terjadi, terdapat SOP dalam menangani masalah yang muncul selama pengimplementasian program. Dalam hal pendistribusian hasil panen dari program ini, belum ada SOP secara khusus dari pemerintah kalurahan, namun itu sudah menjadi wewenang ataupun tanggungjawab masing masing kelompok tani. Artinya, pendistribusian hasil tani tergantung bagaimana dari kelompok tani tersebut, akan dibagikan merata kepada masyarakat atau akan dijual untuk menjadi tabungan kelompok tani.

5. Integritas Berkelanjutan dan Hubungan Lintas Budaya

Program Lumbung Mataraman ini diharapkan akan berkelanjutan dan tidak berhenti sampai disini saja, pemerintah kalurahan aktif dalam membangun relasi dengan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi untuk mengembangkan program lebih lanjut. Adapun rencana untuk mengintegrasikan program dengan sektor pariwisata lokal, yang tentunya juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan.

Secara keseluruhan, implementasi program Lumbung Mataraman di Kalurahan Balong mulai menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Meskipun ditahun pertama penanaman masyarakat belum merasakan dampak yang signifikan, dikarenakan belum masa panen, namun dengan melihat bagaimana komunikasi yang efektif, alokasi sumber daya yang memadai, komitmen yang tinggi dari implementator, struktur organisasi yang jelas, integritas dan hubungan lintas budaya yang baik, serta kesadaran masyarakat membuktikan bahwa program ini akan berhasil dan sangat bermanfaat bagi masyarakat lokal.

Referensi

- Alhamid, & Thalha. (2019). Instrumen Data Kualitatif.
- BPS Kab. Gunungkidul. (t.thn.). Dipetik 2024, dari Indikator Kemiskinan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2023: <https://gunungkidulkab.bps.go.id/indikator/23/194/1/indikator-kemiskinan-kabupaten-gunungkidul.html>
- Gunungkidul, B. P. (2023). *INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL 2023*. Badan
- Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Informasi Pembangunan Daerah*. (2022). Diambil kembali dari BAPPEDA GUNUNGKIDUL: <http://bappeda.gunungkidulkab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/buku-informasi-pembangunan-22.pdf>
- Muryanto, F. (2024). KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA Studi Implementasi Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi di kabupaten Magelang dan Boyolali (Studi Kasus Sister Village di Desa Klakah dan Gantang).
- Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurjanah. (2021). Analisis Kepuasan Konsumen dalam Meningkatkan Pelayanan Pada Usaha Laundry Bunda.
- Pemerintah Daerah DIY*. (2023). Dipetik 2023, dari jogjaprovo.go.id: <https://jogjaprovo.go.id/berita/kalurahan-wajib-siap-sebelum-jalani-program-lumbung-mataraman>
- R, Z. K., Wattimena, Septiyanti, M., & Mutiarin, D. (2021). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah DIY Dalam Membangun Ketahanan Pangan di Era Pandemi Covid-19. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*.